

# KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PROGRAM RESTORASI GAMBUT DI DESA SUNGAI TOHOR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020-2021

Oleh : Erlan Fabiyanto

Pembimbing: Dr. Tito Handoko, S.IP., M. Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

*The Peat Restoration Agency has the main task of coordinating and facilitating the acceleration of the implementation of peat restoration as well as efforts to improve community welfare in work areas in each province that has been determined, one of which is Riau Province. There are 3 programs that are the focus of restoration, namely Rewetting (wetting), Revegetation (greening) , and Revitalization (revitalization of the community's economy). In implementing the BRG program, TRGD is assisted in the regions to coordinate down to the village. This research aims to determine the coordination carried out by the Government and determine the factors that influence government coordination in the Peat Restoration program in Sungai Tohor Village, Meranti Islands Regency in 2020-2021. This research method is descriptive qualitative. Data collection uses interviews and documentation. This research was conducted in Sungai Tohor Village, Meranti Islands Regency. The research results show that government coordination in the peat restoration program is seen from vertical coordination, namely that the provincial TRGD directly coordinates with the Village without involving community groups and NGOs in the Village, then Horizontal coordination shows the results that the formation of work teams by the Village still prioritizes the team's closeness to the Village and there are still strongholds between community groups. Furthermore, there are two factors that influence government coordination in the implementation of the Economic Revitalization Program which are caused by the lack of unity of action and the lack of discipline among community group members in managing the assistance that has been provided.*

*Keywords: Coordination, Governance, Peat Restoration Program*

## PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai lahan gambut terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta hektare (ha) setelah Brazil dengan luas lahan gambut sebesar 31,1 juta ha. Di Indonesia, lahan gambut banyak tersebar di beberapa pulau besar seperti Papua, Kalimantan dan Sumatera. Provinsi pemilik lahan gambut terbesar adalah Papua dengan luas 6,3 juta ha, disusul Kalimantan Tengah (2,7 juta ha), Riau (2,2 juta ha), Kalimantan Barat (1,8 juta ha) dan Sumatera Selatan (1,7 juta ha). Selain itu ada Papua Barat (1,3 juta ha), Kalimantan Timur (0,9 juta ha), Serta Kalimantan Utara, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan yang masing-

masing daerah memiliki 0,6 juta ha lahan gambut (Data Global Wetlands 16 April 2019).<sup>1</sup>

Proses degradasi lahan gambut tidak terlepas dari interaksi tiga komponen yang saling terkait, yaitu tumbuhan, air, dan tanah gambut. Hubungan yang kompleks antara ketiga komponen ini membuat lahan gambut sangat rentan terhadap gangguan. Tanah gambut yang terbuka akan terekspos langsung terhadap pengaruh dari luar. Sebagai contoh, tanah gambut menjadi lebih mudah mengalami erosi akibat terbawa air hujan dan lebih mudah

<sup>1</sup> Data Global Wetlands 16 April 2019

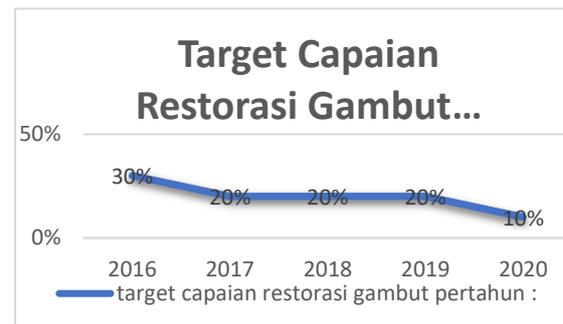
terdekomposisi akibat pengaruh iklim di sekitarnya. Kondisi ini kemudian akan berdampak pada meningkatnya emisi karbon dari lahan tersebut. Hal yang sama akan terjadi jika air dan tanah pada lahan gambut dikeringkan melalui pembuatan kanal drainase dan pembakaran lahan. Selain itu, konversi hutan rawa gambut juga dapat mengakibatkan terkikisnya gambut di daerah pesisir.

Terjadinya kebakaran hebat pada lahan gambut pada tahun 2015 menggerakkan pemerintah Indonesia untuk mulai fokus melakukan restorasi dan perlindungan hutan gambut di Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan melalui dua hal pada tahun 2016, yakni membentuk Lembaga Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta membentuk Badan Restorasi Gambut.

Pembentukan BRG ditetapkan melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang badan Restorasi Gambut yang diundangkan pada 6 Januari 2016. Dengan bertolak dari bencana 2015, pembentukan BRG ditujukan bagi percepatan pemulihan Kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut pasca kebakaran. dengan hadirnya BRG, diharapkan tujuan ini dapat tercapai secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Pelaksanaan restorasi gambut ditargetkan untuk hutan dan lahan dengan luas 2 juta hektare. Restorasi ini disusun dalam rencana pelaksanaan yang berlaku selama lima tahun. Prioritas perencanaan dan pelaksanaan dimulai dari Kabupaten Pulau Pisang di Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, serta Kabupaten Kepulauan Meranti di Riau, untuk kemudian berkembang ke wilayah lain, termasuk Provinsi Papua.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Yuniarto, T. (2023). Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Dalam bentuk pertamanya, BRG dipimpin oleh Kepala BRG dengan dibantu Sekretaris Badan sebagai pendukung administrasi, dan juga terdapat empat deputi disetiap bidangnya. Pelaksanaan restorasi mencakup berbagai kegiatan, meliputi penanaman vegetasi, pembangunan sekat kanal, sumur bor, dan dukungan untuk pendampingan masyarakat. Untuk restorasi 30.000 hektare, BRG memerlukan dana kurang lebih Rp. 40 Miliar. Implementasi dilakukan dengan kolaborasi bersama pemerintah provinsi dan daerah (kilas Iptek 2018:13). Lembaga Pantau Gambut mencatat bahwa meski BRG telah berdiri, kebakaran gambut masih saja terjadi di Indonesia bahkan dalam skala yang besar. Salah satu kebakaran besar tersebut terjadi pada tahun 2019. Sebanyak 711.927,30 hektare lahan gambut terbakar dan menyebabkan kabut asap yang menyebar ke negara tetangga.



Sumber : pantau gambut

Pada tahun 2020, tercapai sudah jangka waktu lima tahun yang telah ditetapkan Perpres Nomor 1 Tahun 2016, maka pemerintah pusat pun memperbaharui Lembaga BRG menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. Pembaharuan ini ditetapkan melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 Tentang BRGM pada 20 Desember 2020. Sebagai pertimbangan, BRG dinilai telah melaksanakan tugasnya dalam rangka percepatan restorasi gambut akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dengan target yang telah ditetapkan untuk diselesaikan. Meski begitu fungsi

restorasi gambut yang diemban BRG masih diperlukan dengan masih berlanjutnya kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut.<sup>3</sup>

Serupa dengan Perpres sebelumnya, target waktu bagi BRGM ditetapkan selama 4 tahun dimulai dari 2021 sampai 2024. Memasuki tahun 2021, BRGM menyambut lembar baru dalam kedua tugasnya, berikut dengan target spesifik merestorasi 1,2 juta hectare ekosistem gambut dan merehabilitas 600.000 hektare mangrove yang rusak. Pemerintah mengharapkan agar pemulihan ekosistem gambut dan penghijauan mangrove tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, namun juga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di dalam ekosistem terkait.

Lahan gambut Provinsi Riau memiliki kualitas yang buruk akibat adanya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem gambut secara besar-besaran oleh perusahaan yang diluar kendali dan tidak bertanggung jawab, sehingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut yang menyebabkan kabut asap dan rusaknya ekosistem di lahan gambut. Kebakaran hutan memberikan dampak negatif yang besar bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Disamping dampak kesehatan yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan gambut, tidak kalah penting juga telah rusaknya ekosistem penting bagi keberlangsungan hidup manusia berupa udara dan air bersih dan juga terganggunya ekosistem bagi satwa liar yang dilindungi. Bencana tersebut telah terjadi di Desa Sungai Tohor pada tahun 2014 yang menyebabkan hilangnya sebagian mata pencarian masyarakat Desa Sungai Tohor yang sebagian besar bergantung pada lahan gambut.

<sup>3</sup> Pantau gambut, terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG). <https://pantau-gambut.id/pantau-komitmen/restorasi-gambut/terbentuknya-badan-restorasi-gambut-brg>

**Tabel Luas dan Kedalaman Gambut Desa Sungai Tohor**

Kedalaman Gambut (cm)	DESA	Luas( ha)
100 - 200	Sungai Tohor	5545,64
200 - 400	Sungai Tohor	1929,03

*Sumber: wetlands diolah oleh Rio Susanto Yayasan Paradigma*

Tahun 2014, terjadi kebakaran besar – besaran di Desa Sungai Tohor yang berdampak besar hingga asap kebakaran sampai ke negara tetangga. Kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut membakar kebun masyarakat Desa Sungai Tohor. Masyarakat Desa Sungai Tohor berinisiatif membangun sekat kanal untuk membendung air gambut yang turun akibat banyaknya kanal galian perusahaan yang menyebabkan gambut tidak bisa menyimpan air di dalamnya. Sekat kanal ini merupakan jalan alternatif yang diambil masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran hutan gambut dan juga menambah persediaan air bagi masyarakat dimusim kemarau. Dampak dari penutupan kanal ini membuat tanah gambut yang tadinya kering di musim kemarau berubah menjadi lembab dan basah, sehingga lahan gambut tersebut tidak mudah tersulut oleh api dan dapat mencegah kebakaran terjadi lebih luas.

Badan Restorasi Gambut ini berdiri pada tanggal 6 Januari 2016 yang bertujuan untuk percepatan pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak akibat kebakaran dan pengeringan. Tugas pokok dan fungsi BRG secara rinci diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 di pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 menjelaskan bahwa tugas pokok dari Badan Restorasi Gambut yaitu: “Mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Provinsi Papua”.<sup>4</sup>

**Tabel 1.3 Program Badan Restorasi Gambut**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	<i>Rewetting</i> (Pembasahan Gambut)	a. Pembangunan Sekat Kanal b. Pembangunan Sumur Bor c. Penimbunan Kanal d. Embung e. Kanal Tali Air
2	<i>Revegetation</i> (Revegetasi)	a. Pembibitan b. Penanaman c. Pemeliharaan
3	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	a. Bantuan Ekonomi Produktif b. Desa Peduli Gambut

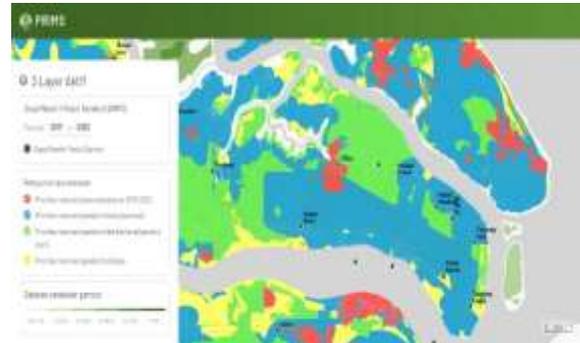
Sumber: Badan Restorasi Gambut

Dengan adanya program badan restorasi gambut dalam percepatan pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kekeringan dan kebakaran diharapkan bisa memberikan perubahan yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat setempat sehingga bisa menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Koordinasi antara Aktor BRG pusat sampai ke TRGD tingkat Desa sangat diperlukan untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, integritas dan harmonisasi program-program restorasi di desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan restorasi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan usaha penyatupaduan, sinkronisasi, integritasi dan harmonisasi dari program-program restorasi agar

pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran secara efektif.<sup>5</sup>

**Peta Desa Mandiri peduli Gambut dan Prioritas Restorasi Kecamatan Tebing Tinggi Timur**



Sumber: PRIMs BRGM

Desa Mandiri Peduli Gambut adalah program pemulihan ekosistem gambut berbasis masyarakat yang dilakukan di luar kawasan hutan dan di luar konsesi. Di kecamatan Tebing Tinggi Timur terdapat 8 Desa Mandiri Peduli Gambut diantaranya Desa Lukun, Desa Sungai Tohor, Desa Nipah Senanu, Desa Sendanu Darul Ihsan, Desa Tanjung Sari, Desa Tanjung Gadai, dan Desa Teluk Buntal. Berdasarkan peta prioritas restorasi oleh BRGM sebagian besar wilayah Tebing Tinggi Timur merupakan lahan prioritas restorasi gambut lindung berkanal yang ditandai dengan warna biru dan prioritas restorasi gambut tidak berkanal (gambut utuh).<sup>6</sup>

Program – program Badan Restorasi Gambut tersebut sudah dilaksanakan di Desa Sungai Tohor. Adapun rincian program Badan Restorasi Gambut yang dilaksanakan yaitu:

1. *Rewetting* (Pembasahan), pembasahan lahan gambut yang kering dilakukan dengan cara penyekatan kanal.

<sup>5</sup> Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Akasara

<sup>6</sup> PRIMs BRGM: Diakses Pada 18 Oktober 2024: <https://prims.brgm.go.id/peta>

<sup>4</sup> PERPRES No 1 tahun 2016, pasal 2 dan 3

Pembangunan sekat kanal dari Presiden Ri, Walhi Riau, NGO Singapura, di Desa Sungai Tohor dengan total 20 Buah, yang berada di Dusun 2 sebanyak 13 buah, Dusun 1 sebanyak 1 buah dan Dusun 3 sebanyak 6 buah. Kemudian pengadaan alat ukur muka air gambut oleh Pusat Studi Bencana Universitas Riau. Program ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk menjaga keseimbangan air tanah gambut supaya tidak terjadi kekeringan di musim kemarau dan juga sebagai pasokan air bagi masyarakat dimusim kemarau. Pembangunan sekat kanal ini dikerjakan oleh masyarakat Desa Sungai Tohor dengan pengawasan dan perdampingan dari lembaga-lembaga pemerintah, NGO dan juga universitas yang ikut andil.

Desa Sungai Tohor telah berhasil melakukan Program *Rewetting* (pembasahan), berhasilnya Program *Rewetting* dapat dilihat pada tahun 2014 – 2016, tidak terjadi kebakaran lagi di lahan gambut Desa Sungai Tohor yang sudah dibangun sekat kanal. Padahal desa ini setiap tahunnya, terutama sebelum tahun 2014 sering terjadi kebakaran, setelah dilakukan *Rewetting*, kebakaran tidak terjadi lagi. Program *rewetting* di Desa Sungai Tohor dilakukan dengan cara membangun sekat kanal di sepanjang parit kekat guna untuk menahan dan mengatur debit air supaya gambut tetap basah dan tidak terjadi kekeringan. Pada tahun 2016 di Desa Sungai Tohor, sekat kanal yang dibangun oleh masyarakat ini menjadi solusi atas bencana kebakaran yang terjadi terbukti dengan berkurangnya kebakaran yang terjadi di Desa Sungai Tohor bahkan berhasil mencapai *Zero Hotspot* pada tahun 2016, selain itu Desa Sungai Tohor juga dijadikan kawasan Laboratorium Internasional Gambut Tropis.

2. *Revegetation* (Revegetasi), ini mencakup pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Restorasi lahan gambut

oleh Walhi Riau dengan penanaman dan pembibitan 1000 bibit kayu alam lokal, dilakukan di lahan yang terdampak kebakaran dan juga di antara tanaman sagu masyarakat guna menyimpan air sehingga air di kawasan perkebunan juga terjaga. Program ini dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Tohor didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat setempat dibawah pengawasan lembaga pemerintahan.

3. *Revitalitation* (Revitalisasi), untuk program Revitalisasi Ekonomi di Desa Sungai Tohor berupa bantuan langsung kepada masyarakat mencakup bantuan peralatan yang berhubungan dengan sumber mata pencaharian Masyarakat Desa Sungai Tohor. Program Revitalisasi Ekonomi di Desa Sungai Tohor sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2016-2020. program - program Revitalisasi Ekonomi masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Program Revitalisasi Ekonomi tersebut dilakukan dengan membentuk kelompok – kelompok yang terdiri dari beberapa anggota dimana setiap kelompok memiliki nama, anggota serta komoditas unggulan masing – masing. Komoditas unggulan dibagi menjadi 4 macam yaitu Tanaman Pangan (TAN), Hortikultura (HOR), Ternak (NAK), dan Perkebunan (BUN).

Tahun 2021, Program Revitalisasi Ekonomi masyarakat di Desa Sungai Tohor dilakukan dengan program pemberian bantuan 3 unit mesin kilang sagu guna untuk membantu masyarakat dalam mengelola hasil sagu. Bantuan juga diberikan dalam bentuk hewan peliharaan yaitu kambing sebanyak 100 ekor kepada kelompok masyarakat dan bantuan bibit sagu untuk ditanam di kebun masyarakat. Namun bantuan ini tidak berjalan sesuai keinginan karena

banyak kendala yang terjadi dilapangan<sup>7</sup>

Dari ketiga program yang telah dilaksanakan di Desa Sungai Tohor tersebut dapat saya simpulkan kurangnya koordinasi antara Tim Restorasi Gambut yang berada di Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam mengkoordinasikan program sehingga tujuan yang dicapai kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin meneliti terkait koordinasi antara tim restorasi gambut yang ada di provinsi sampai ke tingkat desa dalam menjalankan program 3R. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Koordinasi Pemerintahan Dalam Program Restorasi Gambut di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 – 2021”. Sehingga ini menjadi pertanyaan sendiri mengenai Koordinasi yang dilakukan pemerintah dan juga mengenai faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam Program Restorasi Gambut.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat penulis rumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana koordinasi pemerintahan dalam program restorasi gambut di Desa Sungai Tohor kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 – 2021?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi koordinasi pemerintahan dalam program restorasi gambut di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 – 2021?

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah “kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur

manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi” Hasibuan (2006:85). Handoko (2003:195) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

### Tipe – tipe Koordinasi

Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.<sup>9</sup>

1. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan – kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit – unit, kesatuan – kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Koordinasi horizontal (*horizontal koordinasi*) adalah mengkoordinasikan tindakan – tindakan atau kegiatan – kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan – kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang disetingkat. Koordinasi horizontal ini

<sup>7</sup> Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti

<sup>8</sup> Handoko, H. 2003. *Manajemen Personalialia Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua. BPFE, Yogyakarta.

<sup>9</sup> Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Akasara

dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*.

### **Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi**

1. Kesatuan Tindakan, kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri – sendiri.
2. Komunikasi, merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi, pendapat, pesan atau ide yang disampaikannya kepada orang tersebut.
3. Pembagian kerja, adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.
4. Disiplin, menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorang atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan organisasi.

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi merupakan tahapan peneliti menjelaskan cara bagaimana penelitian dapat dilakukan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, peneliti harus menentukan metodologi penelitian yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Untuk memperoleh data dan informasi maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah ( Moleong, 2018

). Pengumpulan data menggunakan Wawancara dan Dokumentasi. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif berarti data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Koordinasi Pemerintahan dalam Program Restorasi Gambut**

#### **a. Koordinasi Vertikal**

Kordinasi vertikal merupakan Tindakan-tindakan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan Program Restorasi Gambut di Desa Sungai Tohor telah terlaksana, di tahun 2020-2021 terdapat 3 program restorasi gambut di Desa Sungai Tohor yaitu *Rewetting* (Pembasahan Gambut), *Revegetation* (Revegetasi) dan *Revitalisasi Ekonomi*. Dalam pelaksanaa program tersebut koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari setiap program. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koodinasi vertikal antara pihak TRGD Provinsi dengan pihak kelompok masyarakat desa sudah dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi mengenai pelaksanaan program. Namun untuk ditingkat kabupaten tidak ada tim dari restorasi gambut yang berfungsi sebagai jembatan penghubung koordinasi antar pihak tersebut, dan TRGD Provinsi sudah tidak melakukan koordinasi ke pihak LSM dan pegiat lingkungan di desa untuk program tertentu melainkan langsung berkoordinasi ke pihak desa, kemudian pihak desa berfungsi sebagai yang mengatur tim kerja lapangan dan

lainnya. Dan juga setiap program yang dikerjakan oleh masyarakat (pegiat lingkungan dan LSM Desa) bukan hanya dibiayai oleh pihak BRG.

### **b. Koordinasi Horizontal**

Keberhasilan suatu program tidak hanya memerlukan koordinasi dari tingkat atasan sampai ke bawah (Vertikal), tetapi juga dalam pelaksanaan program restorasi gambut diperlukan juga koordinasi (Horizontal) diantara pihak desa dengan pihak kelompok masyarakat yang memiliki peran sebagai pelaksana program. Koordinasi Horizontal sendiri memiliki pengertian yaitu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan di dalam tingkat organisasi yang setingkat. mengenai koordinasi horizontal mengenai pelaksanaan program restorasi gambut di Desa Sungai Tohor bahwa koordinasi horizontal antara pihak Desa dengan kelompok masyarakat masih belum berkoordinasi dengan baik, pembentukan kelompok penerima program yang dibentuk oleh pihak desa tidak dipilih secara objektif akan tetapi berdasarkan kriteria tertentu dan kedekatan anggota kelompok dengan kepala desa, seperti untuk program revitaliasi yang memiliki kriteria kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi dan yang siap bekerja. Kemudian untuk kelompok masyarakat yang sering mendapatkan bantuan restorasi gambut dari pihak luar selain BRG tidak lagi dipilih oleh Desa untuk menerima program.

### **b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Pemerintahan Dalam Program Restorasi Gambut di Desa Sungai Tohor**

#### **a. Kesatuan Tindakan**

Dalam pelaksanaan program restorasi gambut di desa sungai tohor

setiap anggota harus mengerti dengan tugas yang telah ditetapkan agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. kesatuan tindakan dalam pelaksanaan program restorasi gambut di Desa Sungai Tohor di lintas atasan sampai kebawah berjalan dengan baik, tetapi untuk lini lapangan sesama anggota kelompok masyarakat masih terdapat kelompok masyarakat yang belum melakukan tugasnya dengan baik, kerja sama antar bagian dan individu dalam kelompok masyarakat hanya dilakukan diawal pelaksanaan program, semakin lama program dikelola terdapat beberapa kelompok dan individu yang tidak bertindak secara bersama-sama, hal ini terjadi dalam program revitalisasi ekonomi, kerja sama dalam mengelola bantuan masih menjadi kendala ada beberapa anggota yang kurang kompak dalam mengelola bantuan yang diberikan sehingga tidak tercapainya tujuan yang diinginkan.

#### **b. Komunikasi**

Dalam hal ini pelaksanaan Program Restorasi Gambut yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengamatan sudah melakukan komunikasi dengan baik antar bagian dalam program mulai dari TRGD sampai ke pihak desa dan kelompok masyarakat. Secara analisis komunikasi memang sangat penting untuk menjalin hubungan yang lebih dalam antar Pemerintah dan Masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan bersama dan dapat bermanfaat kedepannya untuk Masyarakat dan Pemerintah (Rukman, 2019).<sup>10</sup> Berdasarkan penjelasan diatas

<sup>10</sup> Rukman, A. T. (2019). *Koordinasi pemerintah dalam implementasi program makassar ta' tidak rantasa di kelurahan bongaya kecamatan tamalate kota makassar*. 1–87. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7212-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7212-Full_Text.pdf)

sangat dibutuhkan komunikasi yang intens dari pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program restorasi gambut demi menciptakan koordinasi yang baik.

Dari hasil pengamatan dilapangan komunikasi dalam koordinasi pemerintah terhadap pelaksanaan program restorasi gambut di desa sungai tohor sudah terjalin dengan baik, pihak TRGD selalu membuka ruang komunikasi kepada kelompok masyarakat dan pihak desa mengenai kendala yang dialami selama program. Dan pihak TRGD selalu berkomunikasi melalui handphone tidak hanya melalui surat dan laporan kegiatan yang resmi. Dalam melakukan pengawasan program TRGD selalu melakukan pengawasan dan pemantauan yang minimal dilakukan oleh KPH yang berada di Kabupaten, KPH sendiri akan melakukan pengawasan apabila sudah ada perintah dari TRGD Provinsi.

#### **c. Pembagian Kerja**

Prinsip pembagian kerja ini adalah jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program restorasi gambut diperlukan pemilihan bagian-bagian tugas dan membaginya kepada sejumlah orang sehingga setiap anggota dapat mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan masing-masing. Dalam melakukan proses koordinasi pemerintah dalam pelaksanaan program restorasi gambut di Desa Sungai Tohor tentu juga diperlukan pembagian kerja agar proses hubungan kerja dalam koordinasi tidak terjadi simpang siur.

pembagian kerja dalam koordinasi pemerintahan dalam pelaksanaan program restorasi gambut kini sudah baik, setiap anggota tim yang bekerja sudah ditetapkan tugasnya sesuai keahlian yang dibutuhkan. Dari TRGD sudah mempunyai kewajibannya sebagai pelaksana, perencana hingga pemeliharaan dan pengawasan program restorasi gambut, sedangkan ditingkat kabupaten ada KPH sebagai pembantu TRGD Provinsi apabila sudah diberikan tugas dari TRGD, kemudian dari pihak desa hingga kelompok masyarakat juga sudah ditetapkan pekerjaan yang akan di kerjakan misalnya untuk pembuatan sekat kanal, revitalisasi ekonomi dan penghijauan sudah dibentuk tim-tim untuk bekerja sesuai keahlian masing-masing.

#### **d. Disiplin**

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha untuk menerapkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati sebuah peraturan. Disiplin sangat penting dalam organisasi karena dengan melakukan disiplin hendaknya para anggota tim restorasi gambut akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan sesuai ketentuan.

kedisiplinan setiap anggota tim pelaksanaan program restorasi gambut belum berjalan dan dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang mengatakan untuk program revitalisasi ekonomi atau bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat masih menunjukkan kegagalan dalam hal pengelolaan, disebabkan kurangnya kesadaran tiap individu dalam mengelola bantuan secara bersama-sama dan kompak, oleh karena itu bantuan yang telah diberikan berujung kegagalan dan tidak memberdayakan

kelompok masyarakat tersebut. Keberhasilan disiplin kerja hanya berhasil diterapkan di 2 program dari keseluruhan 3 program yaitu program rewetting (pembasahan) dan program revegetasi (penghijauan), hal ini dapat dilihat dari keberhasilan sekat kanal dalam pembasahan lahan gambut dan mengurangi bahkan mencegah kebakaran hingga sampai saat ini. Kemudian program revegetasi penyemaian bibit kayu hutan sebanyak 1000 bibit dan sudah dilakukan penanaman kembali dilahan bekas kebakaran yang sudah dilakukan kini bibit yang ditanam sudah mencapai tinggi 2 meter.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, Koordinasi Pemerintahan dalam pelaksanaan Program Restorasi Gambut di Desa Sungai Tohor terdapat dua indikator yaitu Koordinasi Vertikal TRGD Provinsi kepada pihak Desa dan Kelompok Masyarakat sudah dilakukan namun TRGD hanya berkoordinasi dengan pihak Desa dan tidak berkoordinasi dengan kelompok masyarakat. Tidak adanya TRGD di tingkat Kabupaten menyebabkan pemantauan dan pengawasan program dibantu oleh KPH Tebing Tinggi. sedangkan Koordinasi Horizontal yang dilakukan oleh Pihak Desa dengan kelompok masyarakat masih menunjukkan hasil yang kurang baik, dalam melakukan pembentukan tim kerja oleh pihak Desa masih mengedepankan kedekatan anggota tim dengan Kepala Desa, kemudian masih terdapat kubu-kubuan antara kelompok masyarakat.

Dalam faktor yang mempengaruhi Koordinasi Pemerintahan dalam Program Restorasi Gambut di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2021 terdapat empat indikator dan

hanya dua indikator yang masih menjadi kendala dalam mengkoordinasi pelaksanaan Program Restorasi Gambut yaitu kesatuan tindakan dan disiplin kerja. Pelaksanaan Program Restorasi Gambut di Desa Sungai Tohor menunjukkan hasil capaian yang kurang maksimal khususnya di bidang Program Revitalisasi Ekonomi yang disebabkan tidak adanya kesatuan tindakan dan kurangnya disiplin anggota kelompok masyarakat dalam mengelola bantuan yang telah diberikan.

### Saran

1. Badan Restorasi Gambut (BRG) Pusat sebaiknya membentuk tim pengawas yang berada di Kabupaten yang bertugas melakukan pemantauan terhadap program yang sedang dilaksanakan di daerah masing-masing, hal ini mengingat terlalu luasnya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh TRGD yang berada di provinsi sehingga koordinasi yang terjalin kurang optimal.
2. Pemerintah Desa Sungai Tohor sebaiknya lebih memperhatikan kinerja setiap individu kelompok masyarakat yang kurang disiplin dalam pelaksanaan program Restorasi Gambut terkhusus di program Revitalisasi Ekonomi.
3. Setiap anggota kelompok masyarakat hendaknya lebih serius dalam mengelola pelaksanaan program Restorasi Gambut sehingga kesempatan yang didapatkan tidak sia-sia sehingga bisa berdampak bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi. *Jurnal Papatung*, 2(2), 28-38.
- Handoko, H. 2003. *Manajemen Personalialia Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua. BPFEE, Yogyakarta.

- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Akasara
- Ife, Jime. *Community Development: Creating Community Alternaves – Vision, Analysis and Practice*, (Melbourne Longman, 1997,).
- Suciati, M. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan: Studi Terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 12.
- Sulaeman, D. dkk. *Perlibatan Masyarakat sebagai Kunci Keberhasilan Konservasi dan Restorasi Lahan Gambut*. (Jakarta : WRI INDONESIA, 2024) <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/pelibatan-masyarakat-sebagai-kunci-keberhasilan-konservasi-dan-restorasi-lahan-gambut>.
- Sumodiningrat, G. *Pemberdayaan Masyarakat dan jaring pengaman sosial*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 138.
- Taliziduhu, N. *Kronologi Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: Direksi Cipta, 2003), hlm. 132.
- Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), Hlm 42.
- Asri, B., & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*, 61-78.
- Astika, M. W. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lingkungan Gambut. Hal. 41-47
- Erlina, N., & Yuliani, F. (2017). Analisis Pembangunan *Canal Blocking* Sebagai Solusi Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut Di Desa Sungaitohor Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral dissertation, Riau University). *JOM FISIP*. Vol. 4(2). 1-15
- Kartasasmitha, G. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996), Hlm 145.
- Khairiyah, H. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Lingkungan Gambut. *Prosiding*. 37-40
- Parantean, G. (2019). Analisis Koordinasi Camat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako)
- Permatasari, A. Y. (2023). BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64. *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Rahmeina, F. R., & Meilani, N. L. (2018). Koordinasi Dalam Program Kampung Kb Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rukman, A. T. (2019). *Koordinasi pemerintah dalam implementasi program makassar ta' tidak rantasa di kelurahan bongaya kecamatan tamalate kota makassar*. 1–87. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7212-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7212-Full_Text.pdf)
- Sadra, S., Irawan, A., & Pariyati, P. (2018). IMPLEMENTASI KOORDINASI CAMAT LABUAN KABUPATEN DONGGALA. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).
- Siregar, E. S. (2021). Strategi Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Perekonomian Masyarakat. *Prosiding*. 30-36.
- Sutra, D. P., & Aban, A. (2021). Pengelolaan Wilayah Gambut

- Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Riau. *Prosiding*, 24-29.
- Syafrizal, S., & Resdati, R. (2021). Restorasi Gambut Berbasis Pembedayaan Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMP*.596-601
- Wulandari, S. D., & Salam, R. (2022). Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir di kota tangerang selatan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 534-548.
- \_\_\_\_\_ (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 712-720.
- .Yuliani, F. (2017). Pelaksanaan *Cannal Blocking* Sebagai Upaya Restorasi Gambut Di Kabupaten Meranti Provinsi Riau. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 69-84.
- \_\_\_\_\_. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Jejaring Antar Jejaring Antar Organisasi (*Inter-Organizational Network*) Bagi Pengendalian Karhutla Pada Lahan Gambut. *PROSIDING*.18-23.
- Yuniarto, T. (2023). Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kompas Pedia.<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan-restorasi-gambut-dan-mangrove-brgm>
- “Kilas Iptek: BRG Restorasi 30.000 Hektar Gambut di Kalbar. Kompas, 6 Maret 2018, Hlm 13.
- PRIMS BRGM: Diakses Pada 18 Oktober 2024: <https://prims.brgm.go.id/peta>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut